



IDN/ANTARA

PUSAT VAKSINASI DI RS MILITER PRANCIS

Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly berbicara dengan petugas kesehatan saat mengunjungi pusat vaksinasi di rumah sakit militer HIA Begin, di Saint-Mande, bagian tenggara Paris, Prancis, Minggu (7/3).

Serikat Buruh Siap Mogok Massal Lawan Junta Militer Myanmar

Sembilan serikat buruh dari berbagai sektor siap turun ke jalan.

YANGON(IM)-Serikat buruh terbesar di Myanmar bersiap menggelar mogok massal untuk mengguncang perekonomian negara itu. Demonstrasi ini akan menanamkan tekanan pada pemerintahan jutan malam.

Setidaknya sembilan serikat buruh dari berbagai sektor mulai dari konstruksi, pertanian hingga manufaktur menggerakkan semua rakyat Myanmar berhenti bekerja. Langkah yang dilakukan untuk mendorong militer mengembalikan kekuasaan sipil dan membebaskan pemimpin pemerintahan militer Aung San Suu Kyi.

Dalam pernyataannya sembilan serikat itu mengatakan

melanjutkan kegiatan ekonomi dan bisnis akan membantu militer menindas energi rakyat Myanmar.

“Sekarang ini waktunya untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan demokrasi kami,” kata sembilan serikat tersebut, Senin (8/3).

Organisasi perempuan yang bernama gerakan Htamain (Sarong) memobilisasi massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional sambil menggerakkan militan. Ahad kemarin rakyat Myanmar menggelar unjuk rasa terbesar mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Saksi mata melaporkan suara tembakan dan granat kejut

di berbagai wilayah di Kota Yangon pada Minggu (7/3) malam kemarin. Media pemerintah mengatakan pasukan keamanan berjaga-jaga di sekitar rumah sakit dan universitas.

Polisi menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membebaskan massa di Yangon, Lashio dan puluhan ribu orang yang menggelar aksi di Kota Mandalay. Berdasarkan data PBB hingga kini polisi dan militer Myanmar telah membunuh lebih dari 50 orang dalam unjuk rasa yang rutin digelar setiap hari sejak kudeta.

Di media sosial Facebook pemimpin unjuk rasa Maung Saungkhga mengajak perempuan untuk turun ke jalan melawan kudeta. Sementara salah satu penyelenggara gerakan Sarong, Nay Chi menyebutkan perempuan sebagai ‘revolusioner’.

“Rakyat kami tak bersenjata

tapi bijak, mereka mencoba memerintah dengan rasa takut, tapi kami akan melawan rasa takut,” kata Nay Chi.

Pada Ahad kemarin rakyat Myanmar menggelar tiga unjuk rasa terpisah di Kota Yangon. Walaupun pemerintah militer menangkap sejumlah aktivis pada Sabtu (6/3) malam.

Pejabat NLD tewas

Manajer kampanye dan pejabat partai National League for Democracy (NLD) yang memenangkan pemilihan umum, Khin Maung Latt dilaporkan tewas saat ditahan polisi.

Anggota parlemen yang sudah dibubarkan, Ba Myo Thein mengatakan laporan menunjukkan terdapat luka mencurigakan di kepala dan tubuh Khin Maung Latt. Diduga ia ‘disiksa parah’.

Kepolisian Pabedan tempat Khin Maung Latt ditahan

menolak memberikan komentar. Juru bicara pemerintah militer tidak menjawab permintaan komentar. Angkatan Bersenjata mengatakan cara mereka menanganai demonstrasi sudah sesuai dengan hukum.

Dalam pernyataannya Senin (8/3), militer Myanmar mengatakan Minggu (7/3) kemarin mereka menangkap 41 orang. Pengumuman ini disampaikan di halaman depan surat kabar milik pemerintah Global New Light.

Di laporan tersebut militer mengancam akan mengambil ‘tindakan’ pada orang yang secara langsung atau tidak langsung bekerja untuk komite parlemen yang telah dibubarkan yang mendeklarasikan sebagai otoritas sah pemerintah Myanmar. Pengumuman itu menyebutkan komite tersebut ilegal dan telah melakukan ‘pengkhianatan’. • tom

15 Tewas dan 500 Luka, Pangkalan Militer Equatorial Guinea Diguncang 4 Ledakan

BATA(IM)- Pangkalan militer di Bata, Equatorial Guinea, diguncang empat ledakan besar pada Minggu malam. Informasi sementara menyebutkan 15 orang tewas dan sekitar 500 orang lainnya terluka.

Beberapa video yang diambil dari lokasi kejadian menunjukkan kehancuran pangkalan militer dan banyak

warga sipil berlarian menyelamatkan diri. Media lokal melaporkan rumah sakit terdekat kewalahan dengan kehadiran ratusan korban luka.

Menurut media setempat, empat ledakan terjadi di dalam pangkalan militer yang terletak di kota pelabuhan tersebut.

Salah satu video menunjukkan asap mengepul dari lo-

kasi ledakan dan beberapa wanita menangis dan beberapa dari mereka dalam kondisi terluka sedang dibantu meninjau dari tempat kejadian. Debu dan puing-puing memenuhi langit setempat dan jalan dipenuhi sampah.

Dalam sebuah pernyataan di televisi nasional, Presiden Teodoro Obiang menuding ledakan itu disebabkan oleh

kelalaian penggunaan dinamit di pangkalan tersebut.

“Sedikitnya 15 orang tewas dan sekitar 500 lainnya cedera dalam ledakan itu,” kata Obiang, seperti dikutip Russia Today, Senin (8/3).

Equatorial Guinea adalah koloni Spanyol hingga tahun 1968. Industri minyaknya telah menjadikannya negara kaya di

Afrika Sub-Sahara. Namun, terjadi ketimpangan kekayaan di negara itu.

Negara tersebut baru-baru ini berjuang melawan penyebaran Covid-19, dan jatuhnya harga minyak mentah global—yang menjadi andalan negara untuk sebagian besar pendapatannya. • ans

Kelompok Kriminal Jadikan Vaksin Covid-19 sebagai Alat Penipuan

LONDON(IM)- Pihak berwenang di Inggris telah melaporkan peningkatan aktivitas dari penjahat yang menggunakan vaksin Covid-19 untuk menargetkan publik agar menyerahkan uang tunai atau rincian keuangan. Penipuan individu berkisar dari permintaan ‘bayar untuk suntikan’ hingga beberapa penipuan bahkan mengklaim vaksin cadangan di web gelap.

Gareth Norris, Dosen Senior Psikologi di Universitas Aberystwyth mengungkapkan mengapa hal ini bisa terjadi dan langkah-langkah yang dapat diambil orang untuk melindungi diri dari menjadi korban penipuan ini.

Norris menuturkan, penipuan semacam ini cukup umum, tapi mengenai jumlah pastinya berapa banyak orang yang menjadi korban penipuan dengan menggunakan vaksin sebagai alat, dia menuturkan belum ada data pasti mengenai hal itu.

“Kami tidak tahu berapa banyak upaya penipuan yang dilakukan karena kita sangat jarang melaporkannya. Kecuali jika rumah kita dirampok, Anda dapat melaporkannya ke polisi, tetapi sangat tidak mungkin melakukannya setiap kali kita menerima email atau teks penipuan,” jelasnya.

“Jadi, kami tidak benar-benar tahu berapa banyak percobaan yang ada, tetapi pasti ada banyak contoh orang tertipu atau hampir tertipu atau melaporkannya,” lanjutnya.

Terkait dengan target penipuan, dia menyebut tidak ada target spesifik. Kadang-kadang, jelasnya, mencari secara acak dan mereka mungkin akan menargetkan demografi tertentu. Atau, mereka mungkin mendapatkan alamat email dari forum atau grup online tertentu, bahkan nomor telepon. Sehingga kadang-kadang mereka dapat melakukannya di tempat yang mungkin ingin mereka targetkan, misalnya orang tua.

Para penipu, jelasnya, karena mereka percaya bahwa orang tua lebih putus asa untuk vaksin ini atau lebih mungkin untuk ditipu, dia memiliki persepsi bahwa itu terjadi tetapi sebenarnya setiap orang dapat menjadi korban.

“Sebagian besar penipuan ini hanya mengirimkan pesan ke daftar email, daftar nomor telepon yang telah mereka beli atau temukan secara online, dan mereka hanya mengirimkannya secara massal,” ungkapnya, seperti dilansir Sputnik.

Jika mereka mengirim 2.000 dan mereka hanya mendapatkan beberapa tanggapan yang benar-benar mereka butuhkan dan begitu seseorang terpicak, mereka sering kali dapat menipu mereka untuk mendapatkan banyak uang, tetapi siapa pun benar-benar dapat menjadi korban. Mereka tidak selalu menargetkan orang-orang tertentu,” sambungnya.

Dia lalu memberikan saran kepada orang-orang untuk tidak menjadi korban penipuan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah harus berhati-hati untuk tidak langsung menanggapi dan bertindak tergesa-gesa ketika mendapatkan telepon atau email soal vaksin.

“Jadi, orang-orang sudah siap tetapi pada saat yang sama kita harus berhati-hati tentang informasi apa yang sebenarnya kita terima, dan bagaimana kita bertindak berdasarkan informasi itu,” ungkapnya.

“Hal yang paling penting adalah jika Anda mendapatkan pesan dan Anda berpikir bahwa seseorang menghubungi Anda, Anda kemudian pergi ke sumber yang sebenarnya, jadi akan ada instruksi di sana tentang apa yang harus dilakukan dengan Anda, akan mendapatkan vaksin Anda - apa yang harus dilakukan? yang perlu Anda lakukan,” jelasnya. • gul

Usai Perintah Duterte Tumpas Komunis, 9 Orang Terbunuh

MANILA(IM) - Sekurangnya sembilan aktivis terbunuh pada dalam serangan aparat polisi di Filipina utara. Hal ini terjadi hanya dua hari setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan jajarannya kepolisian membunuh dan meniadakan semua pemberontak komunis di negara itu.

Menurut polisi, enam orang ditangkap selama penggerebekan di tiga provinsi di sekitar Metro Manila pada Ahad. Sementara setidaknya enam lainnya melarikan diri. Polisi juga mengatakan, pihaknya memiliki surat perintah penangkapan terhadap 18 orang. Pihak kepolisian menambahkan bahwa beberapa dari mereka menolak penangkapan yang mengakibatkan polisi menggunakan kekerasan yang mematikan.

Kelompok hak asasi Karapatan dan Partai Kabataan (Pemuda) menentang klaim pemerintah tersebut. Pihaknya mengatakan orang-orang yang terbunuh telah dieksekusi. “Emmanuel ‘Manny’ Asuncion, seorang pemimpin buruh di Provinsi Cavite, di luar Manila, termasuk di antara mereka yang tewas,” kata federasi nelayan Pamalakaya dalam sebuah pernyataan dikutip laman Aljazeera, Ahad.

UPLB Perspective, publikasi mahasiswa di University of the Philippines, melaporkan bahwa dua orang penyelenggara perburuan, mereka sepasang suami istri tewas di provinsi Batangas, yang berbatasan dengan ibu kota Filipina.

Keduanya diidentifikasi

bernama Chai dan Ariel Evangelista, bersama dengan putra mereka yang berusia 10 tahun sebelumnya hilang hanya beberapa jam sebelum kematian mereka. Keberadaan putra mereka masih belum diketahui.

Karapatan mengatakan, mereka ditahan selama penggerebekan dini hari, tetapi tidak menyebutkan siapa yang menahan mereka. Di Provinsi Rizal, Karapatan juga mengonfirmasi tewasnya dua aktivis menyusul insiden penembakan. Sekretaris Jenderal Karapatan, Cristina Palabay, mengatakan militer dengan patuh mengindahkan perintah bunuh, bunuh, dan bunuh dari presiden. Human Rights Watch (HRW) juga menyoroti keprihatinan tentang penggerebekan mematikan tersebut. Berdasarkan laporan, operasi tersebut tampaknya merupakan rencana terkoordinasi oleh pihak berwenang. “Insiden ini jelas merupakan bagian dari kampanye kontra-pemberontakan pemerintah yang semakin brutal yang bertujuan untuk menghilangkan pemberontakan komunis,” ujar Phil Robertson, Wakil Direktur HRW Asia.

Pada Jumat, Presiden Duterte meluncurkan operasi kontra pemberontakan terhadap pemberontak komunis di Mindanao. Ancaman-nya terhadap komunis menimbulkan ketakutan akan gelombang baru pertumpahan darah yang mirip dengan minya “perang melawan narkoba” yang menewaskan ribuan orang, termasuk anak-anak.

Kelompok hak asasi manusia

telah mengingatkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi membedakan antara pemberontak bersenjata, pembela hak asasi, dan kritikus terhadap pemerintahan Duterte.

“Saya telah memberi tahu militer dan polisi bahwa jika mereka terlibat pertempuran bersenjata dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup,” kata Duterte.

“Pastikan untuk mengembalikan jenazah mereka ke keluarga masing-masing. Lupakan hak asasi manusia. Itu pesan saya. Saya bersedia masuk penjara, itu tidak masalah. Saya tidak ragu melakukan hal yang harus saya lakukan,” ujarnya menambahkan.

Pemberontak komunis telah berperang melawan pemerintah sejak 1968, salah satu pemberontakan Maois terlama di dunia. Menurut militer, pemberontakan tersebut telah menewaskan lebih dari 30 ribu orang.

Beberapa presiden gagal mencapai kesepakatan dengan pemberontak, yang pemimpinnya Jose Maria Sison yang sekarang mengasingkan diri di Belanda. Ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, Duterte berjanji untuk mengakhiri pemberontakan melalui pemburangan damai. Ini menyoroti hubungannya dengan komandan pemberontak ketika dia menjadi walikota Kota Davao di Mindanao, tempat pemberontakan komunis masih aktif. • tom



IDN/ANTARA

BLACK LIVES MATTER

Seorang anak kecil meletakkan bunga di sebuah pagar di dekat poster ‘Black Lives Matter’ dalam sebuah reli sehari sebelum pemilihan juri dijadwalkan untuk memulai sidang mantan polisi Minneapolis Derek Chauvin, yang dituduh membunuh George Floyd, di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Minggu (7/3).

Miliarder Prancis Olivier Dassault Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

PARIS(IM) – Sebuah kecelakaan helikopter di Normandia pada Minggu (7/3) menewaskan miliarder sekaligus politikus Prancis Olivier Dassault, demikian keterangan sumber kepolisian. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyampaikan belasungkawanya.

Dassault adalah putra tertua dari mendiang industrialis miliarder Prancis Serge Dassault, yang namanya digunakan oleh Dassault Aviation, perusahaan pembuat pesawat tempur Rafale dan pemilik surat kabar Le Figaro.

“Olivier Dassault mencintai Prancis. Kapten industri, legislator, pejabat terpilih lokal, komandan cadangan di angkatan udara: selama hidupnya, dia tidak pernah berhenti melayani negara kita, untuk menghargai asetnya. Kematian yang tiba-tiba adalah kerugian besar.

Belasungkawa kepada keluarga dan orang yang dicintainya,” kata Macron di Twitter sebagaimana dilansir Reuters.

Helikopter pribadi itu jatuh pada Minggu sore di Normandia, di mana Dassault memiliki rumah liburan, menurut sumber polisi. Pilotnya juga tewas.

Sebagai anggota parlemen dari partai konservatif Les Republicains sejak 2002, Dassault dianggap sebagai orang terkaya ke-361 di dunia bersama dua saudaranya laki-laki dan persuannya, dengan kekayaan sekitar 6 miliar euro (sekitar Rp102,5 triliun) sebagian besar diwarisi dari ayahnya, menurut daftar orang terkaya 2020 versi Forbes.

Dia mengundurkan diri dari perannya di dewan Dassault karena peran politiknya untuk menghindari konflik kepentingan. • gul

Meghan Sebut Kerajaan Inggris Tolak Jadikan Anakny Pangeran karena Khawatir Kulitnya Gelap

LONDON(IM) - Meghan, istri Pangeran Harry, mengatakan keluarga Kerajaan Inggris menolak menjadikan putranya Archie, sebagai pangeran. Alasannya, karena ada kekhawatiran warna kulit anaknya gelap sejak lahir.

Menurutnya, penolakan itu terjadi saat anaknya masih dalam kandungan dan belum diketahui pasti jenis kelaminnya.

“Mereka tidak ingin dia menjadi pangeran atau putri, tidak tahu apa jenis kelaminnya, yang akan berbeda dari protokol, dan bahwa dia tidak akan menerima keamanan,” kata Meghan dalam sebuah wawancara dengan Oprah Winfrey yang disiarkan di CBS yang dilansir Reuters, Senin (8/3).

Ditanya dengan siapa percakapan itu, Meghan enggan membeberkannya; “Saya pikir itu akan sangat merusak mereka,” ujarnya.

Meghan, yang ibunya berkulit hitam dan ayahnya berkulit putih, mengatakan bahwa dia naif sebelum menikah dengan keluarga Kerajaan Inggris pada tahun 2018. Dia bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri dan mempertimbangkan untuk menyakiti diri sendiri setelah meminta bantuan tetapi tidak mendapatkan apa-apa.

Ditanya apakah dia diam atau telah dibungkam, dia menjawab “Yang terakhir.”

Wawancara sangat dinanti-nantikan ini diatur untuk mengintensifkan pertengkaran sengit antara Meghan-Harry dengan Kerajaan Inggris.

Pasangan itu telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan mereka dan memulai hidup baru di Amerika Serikat.

Harry mengatakan dia pergi karena kurangnya pemahaman dan karena dia khawatir sejarah akan terulang kembali merujuk pada kematian ibunya, Diana, pada tahun 1997.

Dia mengatakan dia tidak “membuatkan” neneknya, Ratu Elizabeth II, karena dia terlalu menghormatinya, meskipun ayahnya; Pangeran Charles, telah berhenti menerima teleponnya.

“Saya sudah tiga kali bercakap-cakap dengan Nenek saya, dan dua percakapan dengan Ayah saya sebelum dia berhenti menerima telepon saya. Lalu dia berkata, bisakah Anda menuliskan semua ini?” kata Harry.

Para pengkritik mereka mengatakan pasangan itu menginginkan posisi glamor mereka tanpa dedikasi atau pengawasan yang dibawanya.

Bagi pendukung mereka, perlakuan mereka menunjukkan bagaimana sebuah institusi Inggris yang sudah ketinggalan zaman menjerang seorang wanita birasial modern, dengan nada rasialisme. • ans



IDN/ANTARA

UNJUK RASA ANTI PEMERINTAH DI BANGKOK

Pengunjuk rasa anti-pemerintah menunjukkan salam tiga jari saat demonstrasi dari Kasetsart University menuju monumen Demokrasi, menuntut pembebasan empat pengunjuk rasa yang dituduh dengan hukum lese majeste, termasuk Parit ‘Penguin’ Chiwarak dan Anon Numpa, di Bangkok, Thailand, Minggu (7/3).

Australia Tangguhkan Kerja Sama Pertahanan dengan Myanmar

SYDNEY(IM) - Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanan dengan Myanmar. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Marise Payne menyusul tindakan keras yang intensif oleh militer Myanmar terhadap aksi protes besar-besaran menolak kudeta.

“Australia juga akan mengarahkan langsung bantuan kemanusiaan segera kepada komunitas Rohingya dan etnis minoritas lainnya,” kata Payne dalam sebuah pernyataan pada Ahad malam. “Kami akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan bantuan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah,” kata Payne.

Selama ini hubungan kerja sama pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris. Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, yakni seorang ekonom dan penasihat pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Turnell telah ditahan dengan pemberian akses konsuler terbatas sejak peristiwa kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.

Sementara itu, Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney, selama akhir pekan untuk mendesak pemerintah Australia mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer Myanmar tersebut. Negara Asia Tenggara itu telah jatuh dalam kecacauan setelah tentara mengambil alih kendali pemerintahan Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih, yang disusul dengan aksi protes harian yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan lebih dari 50 orang. “Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menarik diri dari kekerasan terhadap warga sipil,” kata Payne.

Berbagai serikat pekerja utama di Myanmar telah meminta para anggotanya untuk menutup kegiatan ekonomi mulai Senin saat negara itu pada Minggu (8/3) mengalami salah satu hari protes terbesar. • gul